

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. *Corporate Social Responsibility*a. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.¹

Ada banyak definisi tentang CSR, *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional mendefinisikan CSR sebagai berikut:

*“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.*²

Dari definisi tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka,

¹ Priyanto Susiloadi, Implementasi *Corporate Social Responsibility* Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2008, hlm. 124.

² Nor Hadi, Op.Cit., hlm 46

komunitas setempat serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat.

Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut CSR Forum adalah “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment.*”³ Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus berdasarkan nilai-nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut *Business for Social Responsibility* yaitu:

*“Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business.”*⁴

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di antaranya yaitu pengertian dari Lingkar Studi CSR Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah

³ Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers., hlm 21.

⁴ Ibid

ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 1 November 2010 diluncurkan Dokumen ISO 26000:2010 mengenai *Guidance on Social Responsibility* yaitu sebuah standar panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR secara global. Adapun pengertian menurut ISO 26000:2010 yaitu:

“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society, takes into account the expectations of stakeholder, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated through out the organization and practiced in its relationships.”⁵

Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Menurut Johnson and Johnson sebagaimana dikutip oleh Nor Hadi mengartikan *Corporate Social Responsibility* adalah perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.⁶

Sehingga dapat dipahami bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah kontribusi sebuah perusahaan yang terpusat pada aktivitas bisnis, investasi sosial dan kewajiban dalam kebijakan publik sebagai

⁵ Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media., hlm 108.

⁶ Nor Hadi, Op.Cit., hlm. 46

wujud tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu sebagai berikut: ⁷

- 1) Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- 2) Keberadaan (*eksistensi*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau *shareholders*-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh *stakeholders*-nya.
- 3) Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

b. Prinsip Dasar *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi: ⁸

- 1) Kepatuhan kepada hukum, yaitu Undang-undang No. 40 tentang perseroan terbatas, bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia harus mampu memberikan dampak

⁷ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama , 2008. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: ForumSahabat, hlm 9-10

⁸ *ibid.*

positif terhadap masyarakat. Upaya tersebut di atas harus terlihat dari penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

- 2) Menghormati instrument/badan-badan internasional
- 3) Menghormati stakeholders dan kepentingannya. Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.
- 4) *Akuntabilitas* (dapat dipertanggungjawabkan) kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif ekonomis
- 5) *Transparansi* (keterbukaan), dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.
- 6) Perilaku yang beretika. Dalam Islam, etika memiliki dua pengertian: pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Melakukan tindakan pencegahan
- 8) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

c. Bentuk *Corporate Social Responsibility*

Bentuk *Corporate Social Responsibility* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai berikut:⁹

- 1) *Corporate Social Responsibility* bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa prantara.
- 2) *Corporate Social Responsibility* bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau groupnya. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau groupnya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau ke dewan direksi. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju.
- 3) Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan *Corporate Social Responsibility* melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya
- 4) Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan *Corporate Social* atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara

⁹ Priyanto Susiloadi, Op. Cit, hlm. 128.

proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

2. Mutu Madrasah

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), kualitas.¹⁰ Dalam bahasa Inggris mutu diistilahkan dengan “*quality*”,¹¹ sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*juudah*”.¹²

Secara terminologi, istilah mutu memiliki pengertian yang cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan bertentangan. Hal ini disebabkan tidak ada ukuran yang baku tentang mutu itu sendiri. Sehingga sulit kiranya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sama, apakah sesuatu itu bermutu atau tidak.¹³

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.¹⁴ Mutu pendidikan yang dimaksud disini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.¹⁵

Menurut Aan Komariyah menyatakan bahwa mutu merupakan suatu ukuran atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 667

¹¹ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary (third edition)*, modern English Press, Jakarta, 1987, hlm 1550

¹² Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab (edisi lengkap)*, Mukti Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm 1043

¹³ Muhammmad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm 41

¹⁴ Jarome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 75

¹⁵ Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 159

barang (*product*) dan atau jasa (*services*) tertentu berdasarkan pertimbangan obyektif atau bobot dan atau kinerjanya.¹⁶ Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandartkan (*quality is conformance to customer requirement*), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik *inputnya*, proses maupun *outputnya*. Mutu dalam konsep Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Menurut Feigenbaum, sebagaimana dikutip Abdul Hadis dan Nurhayati, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.¹⁷

Dalam dunia bisnis, mutu akan selalu terkait dengan proses terjadinya suatu produk barang, maupun jasa dalam keseluruhan rangkaian proses, yakni bagaimana barang atau jasa tersebut disajikan kepada *customer* dari mulai *input* bahan baku yang akan diproses, kemudian proses menjadikan bahan baku menjadi bahan jadi, sampai pada *output* barang/ jasa yang dihasilkan. Mutu dalam konteks pendidikan, berkaitan dengan upaya pemberian layanan yang paripurna, dan memuaskan bagi para pemakai jasa pendidikan. Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu (*quality*) juga selalu berkaitan dengan bagaimana *input* peserta didik, proses penyelenggaraan pendidikan dengan fokus layanan peserta didik, sampai bagaimana output lulusan yang dihasilkan.¹⁸

Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa

¹⁶ Aan Komariyah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership; Menuju Sekolah Efektif*, Bumi Aksara, Jakarta 2008, hlm 9

¹⁷ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, opcit. Hlm 44

¹⁸ Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, opcit. 159

hasil tes kemampuan akademis. Dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.¹⁹

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.²⁰

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil

¹⁹ Umaedi, 1999, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Menengah Umum, hlm 9

²⁰ Ibid

proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar serta proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan dsb) dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya.

Sebenarnya Islam telah mengajarkan dan memberi dasar tentang mutu. Ajaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mutu merupakan realisasi dari ajaran *ihsan*, yakni berbuat baik kepada semua pihak disebabkan karena Allah SWT telah berbuat baik kepada manusia dengan berbagai nikmat-Nya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Qashash/28:77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَيْتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
 الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S al-Qashash/ 28:77)²¹

2. Seseorang tidak boleh bekerja dengan seenaknya dan acuh tak acuh, sebab akan berarti merendahkan makna demi ridha Allah atau merendahkan Allah. Dalam surah Kahfi disebutkan:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ
 يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا



Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa".

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf*, Madinah, 1998, hlm 623

barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (Q.S al-Kahfi/18:110)²²

Maksud dari kata “mengerjakan amal shaleh” dalam ayat diatas adalah bekerja dengan baik (bermutu dan berkualitas), sedangkan kata janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya” berarti tidak mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan (al-Haqq) yang menjadi sumber nilai intrinsik pekerjaan manusia.

3. Setiap orang dinilai hasil kerjanya, seperti yang dijelaskan dalam surah al-Najm/53:39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (Q.S al-Najm/53:39)²³

Dengan melihat ayat diatas, maka setiap orang dalam bekerja dituntut untuk : 1) tidak memandang sepele bentuk-bentuk kerja yang dilakukan; 2) memberi makna kepada pekerjaan itu; 3) insaf bahwa kerja adalah *mode of existence*; 4) dari segi dampaknya, kerja itu bukanlah untuk Tuhan, namun untuk dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ayat berikut ini:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ



²² *Ibid.*, 460

²³ *Ibid.*, 874

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya. (Q.S Fushilat/41:46)²⁴

4. Seseorang harus bekerja secara optimal dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin selaras dengan ajaran ihsan, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nahl/16:90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبِغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S al-Nahl/16:90)²⁵

5. Seseorang harus bekerja secara efisien dan efektif atau mempunyai daya guna yang setinggi-tingginya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al- Sajdah/32:7:

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴾

Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. (Q.S al-Sajdah/32:7)²⁶

²⁴ *Ibid.*, 780

²⁵ *Ibid.*, 415

²⁶ *Ibid.*, 661

6. Seseorang harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan teliti (itqan), tidak separuh hati atau setengah-setengah, sehingga rapi, indah, tertib, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam surah al-Naml/27:88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي

أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Naml/27:88:)²⁷

7. Seseorang dituntut untuk memiliki dinamika yang tinggi, komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bersikap istiqomah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧٨﴾

Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain²⁸,

²⁷ *Ibid.*, 605

²⁸ Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) Telah selesai berdakwah Maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu Telah selesai mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila Telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.

*Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(Q.S al- Insyiroh/94:7-8)²⁹*

فَلِذَلِكَ فَادَعُ ۖ وَاسْتَقِمْ ۖ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ

ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا

وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ

مَجْمُوعٌ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٩٤﴾

Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetapkan sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". (Q.S al_Syura/42:15)³⁰

Penulis menyimpulkan bahwa mutu dalam konteks pendidikan menyangkut input, proses dan output pendidikan. Mutu juga mengacu pada prestasi atau hasil pendidikan yang berupa hasil tes kemampuan akademis. Mutu juga mengandung tiga unsur, yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, dan pemenuhan janji yang diberikan.

²⁹ *Ibid.*,1073

³⁰ *Ibid.*,785

b. Prinsip Peningkatan Mutu

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu madrasah dalam pendidikan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para professional pendidikan dalam memperbaiki sstem pendidikan bangsa kita.
- 2) Kesulitan yang dihadapi para professional pendidikan adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- 3) Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Para professional pendidikan harus membantu para siswa dalam mngembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
- 4) Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas yang mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan,team work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi.
- 5) Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan.

- 6) Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki para kerja bersifat global.
- 7) Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan.
- 8) Salah satu komponen kunci mutu dalam program mutu adalah system pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para professional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
- 9) Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.³¹

Melihat prinsip- prinsip tersebut, maka terlihat adanya keterlibatan peran masyarakat, hal ini telah dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan, salah satunya adalah PT. Djarum Kudus tentang peduli lingkungan.

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, dkk., *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm .9-11.

c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari lima faktor pendidikan agar kegiatan pendidikan terlaksana dengan baik. Apabila salah satu faktor tidak ada maka mutu pendidikan tidak dapat tercapai dengan baik karena faktor yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling berhubungan. Adapun kelima faktor tersebut adalah:

1. Faktor Tujuan

Mutu suatu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah senantiasa harus berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan *output* yang berkualitas. Dengan adanya perencanaan seperti itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan nasional, intruksional maupun tujuan yang lain yang sebih sempit.

2. Faktor Guru (Pendidik)

Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena gurulah yang merupakan aktor utama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

3. Faktor Siswa

Anak didik atau siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik.

4. Faktor Alat

Adapun yang dimaksud faktor alat (alat pendidikan), adalah segala usaha atau tindakan dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, karena itu perlu dilakukan upaya untuk menyediakan alat-alat tersebut, yang dikategorikan sebagai alat pendidikan adalah sesuatu yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan yaitu sarana, prasarana dan kurikulum.

5. Faktor Lingkungan Masyarakat

Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Karena itulah dibentuklah komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka otonomi sekolah bermitra kerja dengan Komite Sekolah. Peran Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami "sakit". Dunia pendidikan yang "sakit" ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada.

Masalah pertama adalah bahwa pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan "manusia robot". Kami katakan demikian karena

pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar berfikir (kognitif) dan perilaku belajar yang merasa (efektif). Jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang, yang terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berfikir. Sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktekkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering digembar-gemborkan sebagai “pendidikan yang diciptakan manusia siap pakai. Dan ”siap pakai” di sini berarti menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia yaitu:

1. **Faktor Internal**, meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.
2. **Faktor Eksternal**, adalah masyarakat pada umumnya. Dimana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek dari pendidikan.

Penulis menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu sekolah, yaitu faktor internal yang terdiri dari Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Selain itu faktor eksternal juga mempengaruhi yaitu dari lingkungan dan masyarakat. Faktor eksternal

inilah yang sering kurang diperhatikan di dalam membangun mutu dalam dunia pendidikan.

d. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan, komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana-prasarana dan biaya. Mutu pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu daya saing bangsa, sehingga untuk bisa tetap bertahan dalam pertarungan global, maka pendidikan yang bermutu mutlak diperlukan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional, dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia (menyeluruh). Sebagaimana disebutkann dalam Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan : “bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.³²

Mansur dan Mahfud Junaidi menyatakan, setidaknya-tidaknya ada tiga indikator utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas pendidikan, yaitu ; 1) dana pendidikan, 2) kelulusan pendidikan, 3) prestasi yang dicapai dalam membaca komprehensif. *Pertama*, pendidikan yang berkualitas tidak mungkin dicapai tanpa dana yang cukup. *Kedua*, pendidikan yang berkualitas cenderung dapat

³² UU RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, 7

menghasilkan angka kelulusan yang cukup tinggi. Tentu saja kriteria kelulusan ini dengan angka yang sudah distandarkan. *Ketiga*, kemampuan membaca komprehensif di negara berkembang cenderung lebih rendah daripada negara maju, hal ini disebabkan kebiasaan anak-anak menghafal dalam belajar.³³

Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika *input*, proses dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Bila *performace* nya dpat melebihi persyaratan yang dituntut oleh *stakeholder (user)* maka dikatakan unggul. Lantaran tuntutan persyaratan yang dikehendaki oleh para pengguna jasa yang terus berubah dan berkembang. Kualitasnya, maka pengertian mutu juga bersifat dinamis, terus berkembang dan terus dalam persaingan yang terus menerus.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, Nurdin menyatakan bahwa ada beberapa indikatr pendidikan yang bermutu, antara lain :³⁵

1. Hasil akhir pendidikan merupakan tujuan akhir prndidikan. Dari hasil tersebut diharapkan para lulusannya dapat memenuhi tuntutan masyarakat bila ia bekerja atau melanjutkan ke studi ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.
2. Hasil langsung pendidikann. Hasil langsung pendidikan itu berupa; (a)pengetahuan, (b) sikap, dan (c) keterampilan. Hasil inilah yang sering digunakan sebagai kriteria keberhasilan pendidikan.
3. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan interaksi antara *row input*, *instrumental input*, dan lingkungan, untuk

³³ Mansur dan Mahfud *Junaidi*, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, 165

³⁴ Muhammmad Fathurrohman dan Sulistyorini, *opcit. Hlm 60*

³⁵ Muhammmad Nurdin, *pendidikan yang Menyebalkan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2005, hlm 79-80

mencapai tujuan pendidikan. Pada proses ini, tidak berbicara mengenai wujud gedung sekolah dan alat-alat pelajaran, akan tetapi bagaimana mempergunakan gedung dan fasilitas lainnya agar siswa dapat belajar dengan baik.

4. *Instrumental input*. Terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, fasilitas dan media pendidikan, sistem administrasi pendidikan, guru, sistem penyampaian, evaluasi, serta bimbingan dan penyuluhan.
5. *Raw input* dan lingkungan, juga mempengaruhi kualitas mutu pendidikan.

e. Tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah

Tujuan penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.

3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
4. Meningkatkan kopotensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.³⁶

f. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama*, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan *output* yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat *makro* (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat *mikro* (sekolah). Dengan kata lain, bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.³⁷

Abdur Rahman Shaleh menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan menurun dan mengalami perkembangan yang tidak merata. *Pertama*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *educational production function* atau *input-output* yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis- sentralistik, sehingga menempatkan sekolah (madrasah) sebagai penyelenggara pendidikan

³⁶ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *logcit*. 29

³⁷ Muhammmad Fathurrohman dan Sulistyorini, *opcit*. Hlm 67

sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah (madrasah) setempat. *Ketiga*, peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya bersifat input (dana).³⁸

Dikala suatu lembaga pendidikan mendapat penanganan manajerial yang baik sesuai visi dan misinya, maka peningkatan mutu sekolah/ madrasah akan tercapai. Dan inilah yang menjadi tujuan dari peningkatan mutu sekolah/madrasah. Secara terperinci, tujuan dari program manajemen peningkatan mutu adalah:

1. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah/majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah.
2. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah/majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah mauppun di masyarakat setempat.
3. Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah.³⁹

Adapun strategi pengelolaan program dapat ditempuh antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberdayakan komite sekolah/majelis madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
2. Unsur pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini instansi yang terkait antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan

³⁸ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 243-244

³⁹ Hari Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Cipta Cekas Grafika, Bandung, 2005, hlm 17

Kabupaten/Kota, Kementerian Agama (yang menangani pendidikan Mi, Mts dan MA), Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota terutama membantu dalam mengkoordinasikan dan membuat jaringan kerja (akses) ke dalam siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dalam bidang pendidikan.

3. Memberdayakan tenaga pendidikan, baik tenaga pengajar (guru), kepala sekolah, petugas bimbingan dan penyuluhan (BP) maupun staf kantor, pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, unsur komite sekolah tentang Manajemen Berbasis Sekolah, pembelajaran yang bermutu dan peran serta masyarakat.
4. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran.
5. Melakukan supervisi dan *monitoring* yang sistematis dan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, serta segera dapat diberikan solusi/pemecahan masalah yang diperlukan.
6. Mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran, Rehabilitasi/ Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan membentuk tim yang bersifat khusus untuk menangani dan sekaligus melakukan dukungan dan pengawasan terhadap tim bentukan sebagai pelaksana kegiatan tersebut.⁴⁰

Sedangkan menurut Malik Fadjar, strategi peningkatan mutu pendidikan yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi ketrampilan (*broad based education*) dan peningkatan mutu pendidikan berorientasi akademik (*highbased education*). Upaya

⁴⁰ Muhammmad Fathurrohman dan Sulistyorini, *opcit hlm 71-72*

untuk meningkatkan mutu pendidikan berorientasi akademik dapat ditempuh melalui :

- 1) *Quality assurance* kepada semua lembaga pendidikan sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat tersaring pada saat dilakukan *quality control* melalui ujian nasional.
- 2) Menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat memusatkan perhatiannya pada kegiatan mengajar.
- 3) Mendorong daerah dan lembaga untuk dapat memobilisasi berbagai sumber dana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.⁴¹

Dalam tinjauan lain, strategi dalam melaksanakan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁴²

1. *Bechmarking*, yaitu kegiatan untuk menetapkan standar, baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Untuk kepentingan praktis, maka standar tersebut direfleksikan dari realitas yang ada.
2. *Quality assurance* yang bersifat *proses oriented*, yaitu proses yang sedang dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga berhasil secara efektif (sesuai dengan standar).
3. *Quality Control*, yaitu suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya kualitas penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Konsep ini berorientasi pada output

⁴¹ A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, ed. Ahmad Barizi, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 269

⁴² Dikmenum Depdikbud, *Manajemen Peningkatan Mutu dalam suplemen 2 Pelatihan Kepala Sekolah Menengah Umum*, Depdikbud, 1999, hlm 14

untuk memastikan apakah mutu yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ingin dicapai. Oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya indikator yang pasti dan jelas.

4. *School review*, yaitu proses yang mengahruskan semua komponen lembaga untuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan misalnya orang tua, tenaga profesional, pemerintah dan sebagainya.

4. Madrasah

Madrasah merupakan pendidikan Islam di Indonesia yang tergolong masih baru yaitu mulai abad 20, madrasah bukan institusi yang pertama dalam pendidikan Islam di Indonesia, pengembangan madrasah pada umumnya bagi para penguasa muslim sudah jelas. Madrasah-madrasah tersebut didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan orang muslim.⁴³

Madrasah merupakan respon terhadap pendidikan umum dengan memperluas cakupan pendidikannya. Dalam hal ini madrasah memasukkan kurikulum umum, ketrampilan umum, dan fasilitas-fasilitas bagi pendidikan umum. Tetapi madrasah tetap mempunyai muatan lokal yang diambil dari pelajaran yang ada di pesantren pada umumnya.

Kian maraknya lembaga pendidikan Islam di Nusantara perlu di tindak lanjuti tidak hanya oleh pengelola madrasah sendiri akan tetapi membutuhkan otoritas untuk memberikan support baik berupa moral maupun material. Peran madrasah sebagai aset utama yang membentengi moral dan keilmuan benar-benar harus dioptimalkan.

UNESCO dalam hal ini menyebutkan empat visi pendidikan: Pertama, *learning to think* (belajar berfikir) ini berarti pendidikan harus

⁴³ Azumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Kalimah, Jakarta, 2001, hlm. 62.

berorientasi kepada pendidikan yang logis dan rasional sehingga berani bersikap kritis serta mempunyai semangat membaca yang tinggi. Kedua, *learning to do* (belajar berbuat/hidup) yakni diharapkan mempunyai ketrampilan untuk mampu menyelesaikan problem keseharian. Ketiga *Learning to life together* (belajar hidup bersama). Di sini pendidikan diarahkan pada pembentukan seorang murid yang mempunyai kesadaran hidup dalam sebuah dunia global bersama banyak manusia dari berbagai latar bahasa, etnik, agama dan budaya. Keempat *Learning to be* (belajar menjadi diri sendiri). Ini dimaksudkan agar memiliki jati diri sehingga tidak mengalami krisis kepribadian, sehingga di masa depannya bisa tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang mandiri, memiliki harga diri dan tidak sekedar memiliki having (kesenangan materi dan jabatan semata).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat belum mendapat sentuhan tangan dan pikiran kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

Prioritas utama pembangunan madrasah adalah menciptakan citra di masyarakat bahwa madrasah yang bersangkutan memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Hal ini penting karena citra ini akan mempengaruhi pilihan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah tersebut atau tidak. Hal ini berpengaruh dengan masuk atau tidaknya dana operasional madrasah. Citra ini dapat diciptakan dengan cara antara lain penampilan gedung yang menarik, tim olah raga atau kesenian yang sering menang dalam lomba, seragam sekolah yang menarik, guru-guru yang berkualitas, disiplin sekolah yang diterapkan, dan hasil Unas yang baik.⁴⁴

⁴⁴ Muzhoffar Akhwan, *Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan Untuk Semua*, Jurnal Pendidikan Islam, No. 1, Vol. 1, 2008, hlm. 49

Rasanya tidak adil, kalau pemerintah atau pemegang kebijakan pendidikan Islam menuntut lebih banyak peranan masyarakat, *fair* dan adil kalau masyarakat menuntut peran serta yang lebih banyak dari pihak pemerintah. Apalagi kesan masyarakat terhadap pemerintah cenderung “menganak-tirikan” madrasah, khususnya dari segi anggaran dan pembinaan. Meski demikian, peran serta masyarakat dalam pemberdayaan madrasah bukan tidak bisa dituntut lagi.

Secara garis besar peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan itu dapat dikerangkakan sebagai berikut: Pertama, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, yaitu pengembangan manajemen yang lebih *accountable*, baik dari segi keuangan maupun organisasi pendidikan itu sendiri; Kedua, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang *quality oriented*, yakni pendidikan yang berkualitas dan berkeunggulan, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan madrasah menjadi *centers of excellence*, yang menghasilkan peserta didik yang berparadigma keilmuan komprehensif, yakni pengetahuan umum dan agama, plus imtaq. Ketiga, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber belajar lain yang terdapat dalam masyarakat, sehingga sistem pendidikan Islam tidak terpisah dari masyarakat muslim secara keseluruhan.⁴⁵

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

⁴⁵ Muzhoffar Akhwan, Loc. Cit.

Sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.⁴⁶

Lahirnya Undang-undang tersebut baru pemerintah memberikan anggaran yang relatif seimbang para sekolah dan madrasah. Pada 2004 anggaran pendidikan bagi para siswa, mulai dari Ibtidaiah, Tsanawiah, hingga Aliyah, memperoleh subsidi dan anggaran yang relatif sama dengan sekolah umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

Madrasah dengan visi dan misi pembangunan nasional, serta pemanfaatan prospek madrasah dengan nilai-nilai yang positif dalam memenuhi tuntutan masyarakat global. Maka dapat disusun kurikulum madrasah yang realistis sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, di mana dalam perjuangan lembaga pendidikan Islam telah memperoleh hasil yang nyata, karena adanya kerja keras yang dilakukan.

عَلِمَ إِلَىٰ وَسْتُرْدُونَ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ ۗ اللَّهُ فَسِيرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعَيْتُمْ وَالشَّهَادَةُ الْغَيْبِ

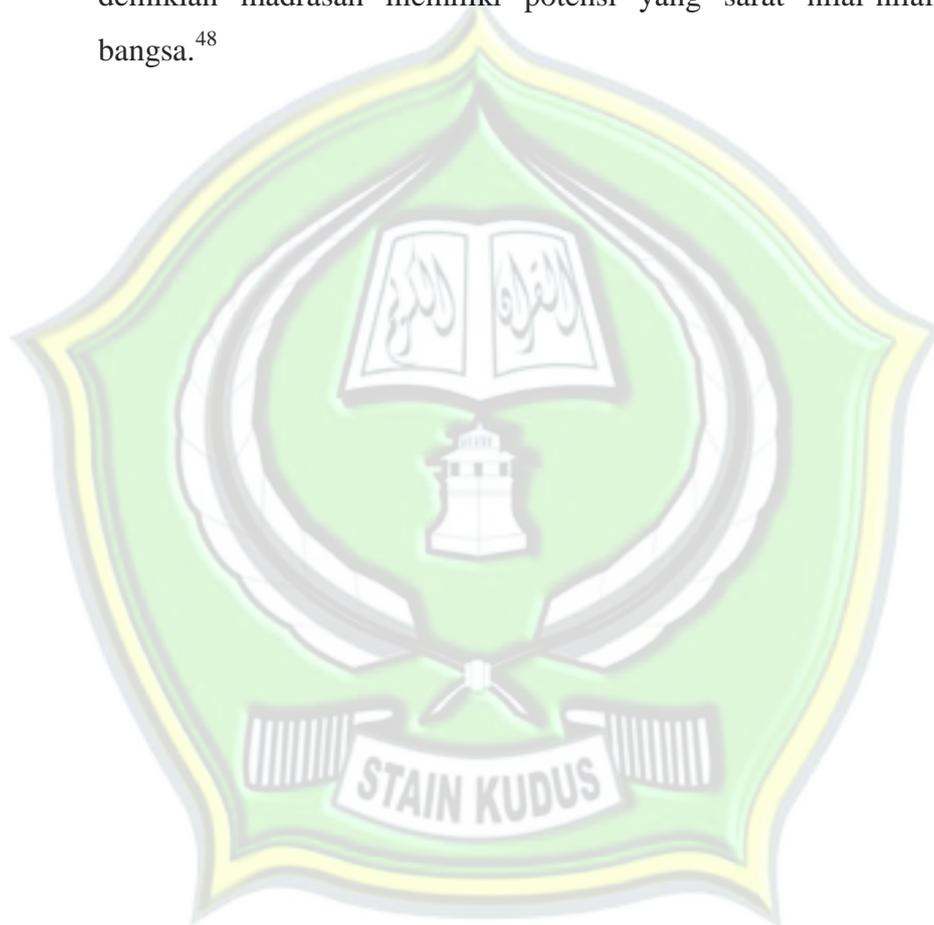
Artinya: "Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. At-Taubah:105)⁴⁷

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, karena karakteristik madrasah sangat sesuai dengan cita-cita

⁴⁶ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2012, hlm. 1-2

⁴⁷ Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 105, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 298.

reformasi. Peranan madrasah sangat menonjol karena: Pertama, pendidikan madrasah yang selama ini seakan-akan tersisih dari mainstream pendidikan nasional namun berkenaan dengan pendidikan anak bangsa; Kedua, madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem pendidikan nasional relatif menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam hal mutu, manajemen, termasuk masalah kurikulumnya. Namun demikian madrasah memiliki potensi yang sarat nilai-nilai budaya bangsa.⁴⁸



⁴⁸ Muzhoffar Akhwan, Op. Cit, hlm. 50.

B. Penelitian Terdahulu

Penting untuk diketahui bahwa penelitian dengan tema senada juga pernah dilakukan para peneliti terdahulu. Dengan ini akan menunjukkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Jannah dengan judul Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Nasima Semarang. Dalam penelitian yang dilakukannya menghasilkan bahwa optimalisasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan SMP Nasima dengan cara pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penataan, sarana dan prasarana pembelajaran. Bentuk pengoptimalisasinya yaitu: mengadakan “*smart class*”, laboratorium komputer, bahasa, sains, kimia, biologi, fisika, untuk mempermudah pembelajaran sehingga belajar lebih menyenangkan.

Di semua area dilengkapi CCTV, adanya LAN (*Lokal Area Network*) dan hotspot area, pengadaan mesin fotokopi, pengadaan koperasi kejujuran, pengadaan ruang musik, pengadaan perpustakaan dan hotspot internet, media audio-visual dan media game edukasi. Selain itu penggunaan sarana masjid sebagai laboratorium akhlak, pengadaan alat-alat olahraga, pengadaan alat scanner LJK dan kertas LJK, dan pengadaan alat praktikum IPA.

Pemeliharaan dilaksanakan satu minggu dua kali untuk alat pembelajaran seperti: komputer, LCD proyektor, dan LCD screen. Sedangkan untuk pemeliharaan gedung, pengecatan dilaksanakan setahun sekali. Akan tetapi jika dilakukan pengecekan setiap satu bulan ada yang rusak maka akan segera dilakukan perbaikan. Pemeliharaan lingkungan sekolah dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan dan di setiap kelas maupun ruangan diberi tempat sampah. Setiap harinya peserta didik sebelum pulang melaksanakan piket

kebersihan kelas, peserta didik sebelum pulang dianjurkan untuk melakukan penataan kerapian perlengkapan kelas.⁴⁹

Penelitian lain juga dilakukan oleh Syifa' Nudiyah dengan judul Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Bangil. Dalam penelitian yang dilakukan dihasilkan bahwa dalam perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran sangatlah penting untuk melibatkan berbagai pihak. Sedangkan perencanaan pembelajaran dilakukan dengan jalan menyusun draft yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Selanjutnya draft itu disampaikan kepada pengurus komite madrasah untuk mendapatkan persetujuan komite madrasah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, MAN Bangil melibatkan peran serta komite madrasah, kepala madrasah, wakamad bidang sarana dan prasarana, kepala urusan tata usaha, juga wakamad bidang kurikulum, kesiswaan dan humas, guru dan wali murid.

Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan mengajukan kepada pengurus komite madrasah. Kemudian bendaharan komite membuat nota persetujuan untuk ditandatangani oleh ketua komite madrasah, sehingga pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran dapat dilakukan. Dan berikutnya adalah evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran di MAN Bangil melibatkan kepala madrasah, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang humas, guru, juga pengurus komite.

Adapun cara yang dilakukan dalam evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Saat tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka dilihat kekurangan apa yang ada dari segi sarana dan prasarana pembelajaran, serta

⁴⁹ Miftakhul Janah, *Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Nasima Semarang*, Skripsi IAIN Walisongo, 2012

program pengembangan sarana dan prasarana apakah yang tidak berjalan. Kekurangan ini kemudian dilaporkan dalam rapat dinas. Dan selanjutnya, laporan itu dievaluasi dalam rapat koordinasi. Pada rapat inilah dibahas solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan berikutnya.⁵⁰

Dalam penelitian yang dilakukan Ali Makhrus pada tahun 2010 dengan judul penelitian : *Analisis Efektifitas Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Membangun Citra Perusahaan*, menyatakan bahwa dalam membangun citra perusahaan dapat dikatakan efektif atau dampaknya cukup baik, jika dibarengi dengan manajemen organisasi yang rapi, melalui persiapan dan tahapan-tahapan yang matang dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait agar memudahkan jalannya program yang berkelanjutan.

Hasil proses pembentukan citra melalui sikap, pendapat, dan tanggapan atau perilaku tertentu dari masyarakat penerima program dapat dikatakan cukup bagus dan efektif karena sebagian besar masyarakat memberikan apresiasi positif terhadap pihak perusahaan.⁵¹

Melihat dari penelitian terdahulu, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini berbeda jauh dengan peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini menitikberatkan pada peran *Corporate Sosial Responsibility* dalam meningkatkan mutu madrasah pada program Djarum Peduli Madrasah.

⁵⁰ Syifa' Nudiyah, *Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Bangil*. Skripsi UIN Malang, 2012.

⁵¹ Ali Makhrus, *Analisis Efektifitas Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Membangun Citra Perusahaan*, Skripsi STAIN Kudus, 2010

C. Kerangka Berpikir

Madrasah berkembang untuk menyelenggarakan pendidikan keislaman tingkat lanjut, yaitu melayani mereka yang masih haus ilmu sesudah sekian lama menimbanya dengan belajar di masjid-masjid. Dengan demikian, pertumbuhan madrasah sepenuhnya merupakan perkembangan lanjut dan alamiah dari dinamika internal yang tumbuh dari dalam masyarakat Islam sendiri.

Sebagaimana yang ada di MI NU Tsamrotul Wathon Gondosari Gebog Kudus sekarang ini telah mengalami perkembangan yang baik, ini terlihat adanya kerjasama dengan perusahaan ternama, yaitu PT. Djarum Kudus dalam hal peduli lingkungan. Dengan adanya kegiatan kerjasama peduli lingkungan ini merupakan bentuk peduli untuk melakukan pengembangan mutu madrasah karena meningkatkan mutu madrasah tidak hanya dalam hal akademis tetapi juga hal non akademis (kerjasama dengan pihak luar).

Peduli lingkungan dalam perusahaan namanya adalah *Corporate Sosial Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* merupakan kontribusi sebuah perusahaan yang terpusat pada aktivitas bisnis, investasi sosial dan kewaiban dalam kebijakan publik sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam artian melakukan pencegahan polusi dari perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus selama ini melakukan penghijauan untuk kesehatan masyarakat.